



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI BUMN RI**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 11 (Sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.55 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I DPR RI,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P.Nasdem)
- Acara : 1. RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan
Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024;
3. Rencana Usulan PMN Tahun 2025;
4. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
23 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)**

8 orang Anggota dari 12 Anggota

1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof (Assc). Dr. Darmadi Durianto,
S.E., M.B.A.
3. Rieke Diah Pitaloka
4. Sonny T. Danaparamita
5. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
6. Sondang Tiar Debora Tampubolon
7. dr. H. Mufti A. N. Anam
8. I Nyoman Parta, S.H.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG))**

4 orang Anggota dari 8 Anggota

1. Ir. H. Mohamad Idris Laena
2. Doni Akbar, S.E., M.M.
3. Nusron Wahid
4. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)

5 orang Anggota dari 8 Anggota

1. Andre Rosiade
2. H.M. Husni, S.E., M.M.
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

1 orang Anggota dari 6 Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 orang Anggota dari 6 Anggota

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

0 orang Anggota dari 5 Anggota

-

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Amin Ak, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 orang Anggota dari 2 Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN RI (Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A.)

2. Wamen BUMN (Kartika Wiroatmodjo)
3. Sekretaris Kementerian BUMN (Rabin I. Hattari)
4. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Kementerian BUMN (Nawal Nelly)
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Robertus Bilitea)
6. Staf Khusus Kementerian BUMN (Arya Sinulingga)
7. Staf Ahli Bidang Industri (Andus Winarno)
8. Staf Ahli Bidang Keuangan (Loto Srinaita Ginting)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri ya.

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Menteri BUMN
Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir,
Pak Wamen, Pak Tiko,
Jajaran dari Kementerian BUMN,**

Kita mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN pada hari ini dalam keadaan sehat.

Bapak-Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 13 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI, yang terdiri atas 6 fraksi.

Jadi memang, karena ini hari Jumat, Pak Menteri, banyak yang kundupil dan juga mungkin acara di fraksi.

Dengan demikian, kuorum telah terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan



Pasal 276 ayat (1). Maka, perkenankan kami membuka Rapat Kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.57 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini adalah pembahasan mengenai:

1. RKP dan RKA K/L Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2024;
3. Rencana Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025; dan
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Untuk itu, kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 16.30? 16.30 bisa ya? Setuju. Ya maksimum 16.30?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang kami muliakan,

Sebagaimana kita *ketahui* dalam siklus anggaran, maka pada hari ini kita akan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah. Dan RKP dan RKA K/L ini tentu disusun dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan dan program sebelumnya dan program selanjutnya untuk dilaksanakan dengan optimal. Dan tentunya juga bagaimana kerja-kerja pemerintah bisa menyentuh ke level masyarakat yang paling bawah, yang tentunya diamati oleh masing-masing Anggota DPR di Komisi VI ini.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: S-346/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan surat Nomor: B.201/D.8/PP.04.03/04/2024, tanggal 5 April 2024 dan pendalaman yang telah dilakukan oleh Komisi VI DPR RI bersama dengan pejabat Kementerian BUMN, Pagu Indikatif Kementerian BUMN RI sebesar Rp277.498.437.000,00. Dan kami juga sudah menerima usulan tambahan anggaran pada saat *konsinyering* dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN untuk tahun 2025 sebesar Rp66.644.541.000,00, yang digunakan untuk mendukung tupoksi utama Kementerian BUMN dalam melakukan pengembangan dan pengawasan BUMN.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya terkait RKP dan RKA K/L ini dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan usulan PMN tahun 2025.



Kami persilakan.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Kepada Pimpinan Komisi VI yang terhormat, dan
Wakil rakyat yang hadir dari Komisi VI,**

Terima kasih atas undangan dan kesempatan untuk kita dapat memberikan paparan mengenai tentu anggaran yang sudah diberlakukan pada tahun 2023 dan juga anggaran 2024 dan juga usulan 2025 dan rencana untuk PMN dan juga realisasinya mengenai *deviden* dan rencana *deviden* tahun 2025.

Adapun yang saya bisa sampaikan bahwa daripada realisasi anggaran tahun 2023, *alhamdulillah* kita bisa menyerap sampai 98,57%, yaitu dari 238 miliar yang sebelumnya tentu dari pagu sendiri 241, tapi yang kita bisa serap 238. Dan tentu ini kita coba jaga untuk tahun 2024 ini, yang di mana sampai hari ini kita sudah menyerap kurang lebih sampai bulan Juni 35%, yaitu senilai 99,68 miliar dari tentu pagu yang sudah di-*adjust* oleh Kementerian Keuangan yang sebelumnya harusnya 308 menjadi 284. Jadi, kita coba pastikan di tahun 2024 ini kita akan bisa menjaga konsistensi daripada serapan, tentu di angka 98 sampai 99% lebih, yang kita bisa coba lakukan.

Tentu untuk Pagu Tahun 2025, sekarang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai 277, tetapi tentu ini lebih rendah 16% sebenarnya dari pagu yang sebelumnya 328 atau juga lebih rendah lagi 10% daripada pagu sebenarnya tahun ini, 2024. Karena itu, terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih 66 miliar yang bisa kita dapatkan, sehingga Pagu Indikatif yang kita harapkan tahun 2025 itu di angka 344.

Dan ini sejalan tentu seperti yang selalu Komisi VI tekankan kepada kami, bahwa pentingnya peningkatan pengawasan untuk juga pengembangan daripada BUMN itu sendiri.

Dan kalau kita lihat Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat, bahwa memang kita merencanakan di tahun 2024 ini *kan* memang *deviden* yang ditargetkan nanti itu kurang lebih 85 triliun, jadi naik dari 81 triliun.

Nah, karena itu, memang pentingnya dukungan pendanaan pengawasan dan juga operasional dari kami, dari Kementerian BUMN. Dan tentu yang kita juga ingin tekankan pada saat paparan ini juga mengenai



status PMN tahun 2024. Di mana status PMN 2024 ini, kita telah menerima dukungan dari negara, yaitu dari 3 BUMN yang sudah didapatkan, yaitu:

1. 18,6 triliun untuk HK, lalu;
2. Wika 6 triliun, lalu;
3. IFG 36 triliun.

Nah, memang yang masih dinegosiasikan untuk PMN melalui cadangan investasi 2024 itu, yaitu:

1. Untuk BUMN KAI 2 triliun;
2. INKA 1 triliun;
3. HK 1,6 triliun;
4. IFG 3 triliun, dan;
5. Pelni 3 triliun.

Nah, ini yang kita masih dorong apalagi kalau kita lihat catatannya, ini kan memang 69% dari usulan PMN ini adalah penugasan, 69%. Jadi, yaitu sebesar 30,4 triliun. Lalu, untuk pengembangan usaha yaitu 27%, yaitu 11,8 dan restrukturisasi 4%, yaitu 2 triliun. Jadi, porsi terbesar tetap penugasan.

Nah, di sinilah ya kita tetap mengharapkan untuk cadangan daripada investasi ini, kita bisa mendapatkan maksimal, walaupun indikasi sepertinya angka yang kita usulkan, dari Kemenkeu sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Tapi kita masih berusaha untuk mendorong untuk khusus yang cadangan investasi ini bisa maksimal.

Itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini, Pimpinan. Mungkin, nanti kalau ada hal-hal tambahan lain, kami harapkan mohon arahan dan terus dukungan dari Komisi VI untuk kinerja yang kita bisa lakukan dari Kementerian BUMN itu sendiri.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, terima kasih kepada Saudara Menteri BUMN.

Kita akan masuk ke pendalaman dari Bapak-Ibu Anggota. Saya persilakan dari sayap kiri, ada Pak Husni.

Hah? Oh kanan dulu? Dikasih duluan enggak mau nih.

Pak Amin, Pak Amin di kanan.



F-PKS (AMIN Ak, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Erick sebagai Menteri BUMN,
Mas Tiko, Wamen BUMN,
Bang Arya, dan
Semua jajaran, hadirin sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat
saya pada *panjenengan* semua, enggak bisa saya sebutkan satu per
satu,**

Sudah lama *nih* rasanya enggak jumpa dengan Pak Erick. Rapatnya hari Jumat, nah, ini pas kebetulan saya enggak ke dapil ini. Biasanya hari Kamis sore sudah melancong ke dapil.

Pertama, tentu kami memberi apresiasi, Pak, atas kinerja Kementerian BUMN, khususnya pertama dari setoran *deviden* tahun 2023 yang meningkat pesat dibanding tahun 2022. Ya itu, ya pada indikator sederhana *lah*, ya kinerjanya yang sangat baik.

Di sisi lain, PMN 2023 menurun dibanding dengan 2022, walaupun tentu kalau bicara soal besaran PMN *tuh* sangat relatif ya. Karena, mayoritas bersifat penugasan.

Yang kedua juga, kami mengapresiasi banyaknya masalah-masalah yang terjadi di BUMN. Mungkin tepatnya warisan masalah yang terjadi di BUMN yang masuk ke ranah hukum. Tentu, ini suatu yang baik, walaupun mungkin masyarakat kalau tidak baca detailnya, ini *kok* BUMN banyak masalah, padahal memang saya kira 90% masalah itu terjadi *udah* sejak dulu, sebelum Pak Erick, Mas Tiko ini menjabat. Ya, baik itu Jiwasraya, ASABRI, Garuda, delapan BUMN bahkan Timah ya, yang berlanjut ya. Kemudian, Antam yang lagi ramai ya, Timah, Antam. Ini masalah-masalah yang terakumulasi, ada yang dari tahun 2010, 2015 ya. Dan tentu yang terbaru ini yang juga lagi ramai Indofarma, Kimia Farma. Saya enggak tahu detailnya, tapi mungkin itu menjelang-menjelang Covid ya. Itu sebelum itu, yang terakumulasi. Dan tentu itu membutuhkan penanganan yang serius ya.

Harapan saya, Pak, walaupun ini masa jabatan 2019-2024 ini mau berakhir ya, tapi bukan berarti Pak Erick dan jajaran tidak bisa mengambil keputusan yang sangat strategis ya, demi kemajuan BUMN di masa yang akan datang.

Ini karena Pak Erick Ketua PSSI dan setiap hari *berkelut* dengan bola, mungkin saya kasih analogi dengan semifinal Real Madrid lawan Bayern Munchen, Pak, ya. Sampai menit ke-87, Bayern Munchen itu masih unggul



ya, secara agregat gol, ya, ya. Pada menit ke-81, Carlo Ancelotti masukkan pemain yang selama ini enggak pernah dipakai, namanya Joselu, ya. Tahun 8, eh maaf, menit ke-88 dia buat gol, menyamakan, agregat gol dan menit ke-90 plus 1, ya mencetak gol keduanya. Jadilah itu ya jalan bagi Real Madrid untuk masuk final dan menjadi juara untuk ke-15 kalinya, meraih Piala Champions.

Nah, tentu di masa yang singkat ini ya, Pak Erick, tentu bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Saya *sih* berharap nih dari hati nurani yang jujur, semoga Pak Erick bisa jadi Menteri BUMN lagi. Kalau jadi Menko, minimal penggantinya Mas Tiko *lah, gitu kan*.

Ya, harapan kami, karena, ya karena *gini*, kita kalau dari PKS bisanya berdoa, Bang Deddy, ya. Kalau urusan yang lebih strategis, bisa membuat keputusan, nah, ini sebelah saya *nih*, sebelah-sebelahnya lagi ini, ya. Kita bisanya berdoa, mendoakan, dan tentu bukan basa-basi ya. Ya harapannya begitu, Pak.

Bagaimana masalah-masalah ini yang ada itu terselesaikan dengan baik dan potensi-potensi untuk terjadi masa yang akan datang itu benar-benar bisa kita mitigasi dengan sebaik-baiknya. Tentu, kata kuncinya adalah bagaimana merekrut SDM atau ini ada anggaran pembinaan dan pengembangan dan pengawasan. Itu benar-benar difungsikan dengan sebaik-baiknya, ya, di Kementerian BUMN, terhadap BUMN-BUMN kita.

Seingat saya dulu, Kementerian BUMN *tuh* punya inspektorat ya, tapi enggak ada Pak ya? Ada ya? Seingat saya, ada ya? Ya, diperkuat itu fungsi Itjenya, Pak, diperkuat benar-benar *gitu loh*, sehingga masalah yang terjadi di BUMN itu bisa diantisipasi sejak awal, ya.

Kita tidak bisa mengandalkan, mohon maaf, bukan berarti apa ya, konteksnya meremehkan, bukan. Kita tidak bisa terlalu mengandalkan auditor-auditor dari luar, auditor eksternal BUMN. Yang lebih penting adalah bagaimana auditor internal di Kementerian BUMN dan juga mungkin memfungsikan dengan sebaik-baiknya fungsi internal audit di setiap BUMN.

Memang ada masalah, karena internal audit posisinya di bawah direksi, pasti ada *ewuh pakewuh*, ya enggak berani mengungkap kalau terjadi masalah. Bahkan ada kesan selama ini orang-orang yang ditaruh di internal audit, dalam tanda kutip, orang-orang yang disingkirkan atau orang-orang yang dianggap kurang dekat dengan direksi, dan dia ketika mau menjalankan perannya atau tugasnya itu setengah-setengah ya, sehingga terjadilah kasus-kasus yang sebagaimana kita dengar dan kita saksikan bersama.

Itu, Pak, pertama. Kemudian yang kedua, khusus, Pak, khusus untuk yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, masalah yang terjadi di apa namanya, kalau Indofarma, Kimia Farma itu jelas, Pak. Itu modus, bagaimana apa ya, apa, memanfaatkan anak perusahaan *kan*, kasusnya di situ ya. Ini saya kira trik-trik yang perlu diantisipasi juga.

Yang perlu saya soroti dan saya sampaikan ke Pak Erick, masalah yang terjadi di, apa, Bank Syariah Indonesia. Di mana kami mendapat pesan dari beberapa orang ya, ini *kan* menurut saya masalah kelihatannya sederhana tapi juga serius ya.

Bagaimana Muhammadiyah menarik dana berapa, 13 atau 15 triliun, itu bukan dana yang kecil, Pak, dan itu bisa, ya walaupun mungkin tidak besar ya, tapi bisa mengganggu likuiditas BSI. Berapa DPK yang selama ini terkumpul? 290-an. Berapa yang tersalurkan ke pihak ketiga? sekian. Ketika ditarik ya 15-an triliun, ya itu tentu sangat mengganggu, ya apa namanya, usahanya BSI.

Kok saya melihatnya ini, walaupun sudah ada penjelasan dari Muhammadiyah sendiri, itu penjelasan yang sifatnya untuk mendinginkan ya, masyarakat. Tapi saya yakin masalahnya bukan itu ya, masalah intinya bukan itu.

Kalau menurut saya, ini menurut saya. *Nampaknya* mungkin jajaran manajemen BSI lebih mempertimbangkan banyak aspek politik daripada aspek bisnisnya ya. Orang memiliki dana 13 atau 15 triliun itu *kan* mesti diberlakukan berbeda dengan orang yang cuma punya simpanan 100 juta atau 1 miliar begitu ya.

Itu harus mestinya, ya mestinya, harus ada perlakuan yang berbeda. Memang, perusahaan punya kebijakan, punya SOP, tapi *kan* direksi bisa membuat kebijaksanaan. Itulah namanya bisnis, saya pikir begitu. Intinya pada bagaimana kualitas layanan ya, sebaik-baiknya, ya, dan bagaimana pihak yang menjadi *stakeholder* dalam ini nasabahnya, nasabahnya BSI, benar-benar dalam tanda kutip yang mendapat *privilege*, mendapat keuntungan ya, mendapat apa ya, perlakuan yang sewajarnya. Itu satu, Pak.

Iya, jadi menurut saya, perlu di evaluasi secara serius, kinerja manajemen BSI. Yang ini sebetulnya *udah* yang kedua kali ya, minimal, viral, dari beberapa bulan yang lalu kasus kena virus apa itu, *Ransom LockBit* atau apa itu, dan itu penyelesaiannya jadi tidak begitu cepat. Di luar dugaan banyak orang, kita semua berharap 1-2 hari, *tapi* ternyata *pekanan*, ya, dan tentu ini bidangnya Mas Tiko ini ya, seperti itu.

Kemudian yang kedua, Pak, walaupun sudah rapat dengan Telkom, manajemen Telkom. Ini juga menjadi tantangan bisnis Telkom, Pak. Walaupun regulasinya ada di Kominfo, bukan di kita, *tapi* bagaimana Telkom itu meningkatkan layanan sebaik-baiknya, kualitasnya dan yang kedua tentu bisa, *harga* *kan* harus bersaing *kan*. Bisnis itu intinya dua *kan*, kualitas layanan dan juga harga yang bersaing ya.

Ketika saya ditanyai oleh banyak, beberapa media *lah*. Ya memang kita dilema menjawab, *nolak*, ya secara umum ya kita *nolak* kehadiran Starlink, *tapi* kalau, bagaimana kalau pemerintah itu mengizinkan, atau malah mengundang? Ya tentu, dari sisi kita, Kementerian BUMN, tidak ada lain,

bagaimana benar-benar manajemen Telkom itu meningkatkan efisiensinya di satu sisi dan juga meningkatkan kualitas layanannya.

Saya kira itu. Dua itu *aja*, Pak yang saya sampaikan.

Untuk anggaran, saya apresiasi, saya setuju saja. Ini termasuk tambahan untuk fungsi pengembangan pengawasan, saya setuju. Termasuk juga ajuan-ajuan apa namanya ini, PMN, karena sebagian besarnya adalah untuk penugasan, proyek-proyek penugasan.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, makasih, Pak Amin.

Pak Husni, sudah siap?

F-P.GERINDRA (H. M. HUSNI, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Seluruh jajaran Komisi VI,
Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Pak Erick
Thohir,**

Terakhir, sedikit *aja* saya mau *nanya nih*, Pak, karena di depan saya ada Pimpinan saya, Pak Andre Rosiade.

Begini, untuk memaksimalkan fungsi KBUMN dalam mengelola BUMN, dibutuhkan peningkatan anggaran tahun 2025. Anggaran tambahan sebesar 66,6 miliar, itu kita terima dengan baik, Pak Menteri.

Cuma ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, karena salah satu kita membentuk Kementerian BUMN ini, yaitu untuk mendorong perekonomian, sekaligus menyediakan barang dan jasa dan menggerakkan ekonomi dalam mencari keuntungan dan memberi manfaat kepada orang banyak.

Pak Menteri yang saya hormati,

Karena, Kementerian BUMN ini, Pak, bukan hanya mengurus yang di darat, Pak, di laut juga diurus, di udara juga diurus, di hutan juga diurus, Pak. Ya ada tambang, ada perbankan, ada Pelni, ada Telkom dan lain sebagainya.

Saya masuk ke Komisi VI ini agak terkejut-kejut sedikit, Pak. Kenapa anggarannya kecil? *dulu* saya Komisi VIII Pak, semua angka pakai angka T, T, T, T, bahkan BNPB *aja* dia punya helikopter, Pak. Ya dia untuk melakukan kunjungan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang cuma diurus kebakaran hutan. Tapi saya lihat Pak Menteri ini, ya kalau saya boleh bilang ini *complicated* untuk menjaga orang-orang yang menghasilkan uang, daerah-daerah yang memberikan nilai *value added* untuk ekonomi.

Jadi agak aneh juga, Pak, ya, kenapa begitu kecil, sedangkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk Kementerian BUMN ini saya pikir juga cukup lumayan berat. Bagaimana menghasilkan pendapatan-pendapatan negara secara maksimal.

Memang kita tahu ya, pada tahun 2000 apa, 2023, banyak BUMN-BUMN apalagi dari sektor perbankan yang memberikan keuntungan yang sangat signifikan. Namun, kita juga melihat apa ada permasalahan-permasalahan di BUMN itu sendiri. Saya rasa yang paling bermasalah, mungkin ya, apakah, saya tidak cerita SDM yang kurang, *tapi* yang sudah pasti mungkin ya pengawasan ketat dan melekat itu bukan enggak gampang itu melaksanakannya, itu yang pertama.

Dan yang kedua, Pak Menteri, teknologi informasi kita ini berkembang sangat pesat ya. Kadang-kadang kita yang di kementerian sendiri, kita belum merencanakan, tapi teknologi-teknologi baru itu sudah muncul.

Nah, mungkin, mungkin salah satu kelemahan-kelemahan kita di ya, di mana pun, bahwa kita selalu ketertinggalan di dalam apa, teknologi informasi ini sendiri.

Jadi, tentunya saya pernah berkunjung ini Pak Menteri ke PT Inalum di Asahan. Itu kebetulan, apa ya, kampung halaman saya *lah*, dapil saya di Sumatera Utara. Saya waktu saya rapat *sih*, saya terkejut juga katanya ada masalah lama di Inalum, itu masalah dengan PLN yang belum terselesaikan, belum pernah ketemu titik temu dalam masalah harga.

Waktu saya kunjungan ke PLN Sumatera Utara, barangnya ada, barangnya ada. Wah, saya pikir *nih* tinggal kebijaksanaan atau keputusan politik, karena keduanya ada di bawah Kementerian BUMN Republik Indonesia.

Jadi, tentunya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa dapat terealisasi dan terlaksana, walaupun kita sudah di penghujung.

Itu *aja* saya rasa, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Ketua, saya enggak berpanjang-panjang. Saya akhiri.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Silakan, Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih.

**Pimpinan,
Pak Menteri dan jajaran,**

Saya kira sama seperti teman-teman, kalau dari sisi anggaran kita sampaikan apresiasi, karena penyerapan anggaran kita, walaupun kecil ya, *tapi* kan tetap *aja* sesuai *size*-nya ya, dan itu bisa sampai apa namanya, melebihi ekspektasi, kalau menurut saya, dibanding banyak Kementerian lain.

Tetapi, saya melihat pada semester pertama ini kenapa baru 35% ya? Mungkin, bisa dijelaskan sedikit, karena memang *kan* biasanya di triwulan terakhir baru *dikebut*, *gitu* ya, *tapi* ini *kan* agak cenderung lamban kalau menurut saya.

Nah, kami sepakat dengan saya pribadi sepakat dengan usulan penambahan ini, karena saya kira dengan target yang dibebankan lebih besar, seharusnya itu *match*.

Tapi, saya ingin tanya juga ke Pak Menteri, ini apakah proyeksi dividen 2024 ini akan tercapai atau melebihi ekspektasi atau seperti apa? Karena, kita melihat kemarin *kan* selama proses pemilu kita yang gaduh ini, setahun ini, *kan* banyak yang *ngerem-ngerem* juga ya, apakah itu berimplikasi *gitu*.

Lalu, saya juga ingin sampaikan Pak Menteri, karena ini ya kita berharap Pak Menteri juga masih meneruskan. Tetapi kita ingin, Pak, dari *roadmap* kita yang dulu, apakah ada yang bisa kita evaluasi? dan kapan ya? sehingga kita bisa, apa namanya, mencari kesinambungan, apa namanya, meningkatkan apa yang sudah dilakukan atau mana yang pada tahap-tahap awal, sehingga ada keberlanjutan. Karena, ini menurut Pak Andre Rosiade kan rezim keberlanjutan, ya Pak Andre ya, jadi supaya semua yang baik itu bisa diteruskan.

Lalu yang ketiga, saya kira di ujung seperti ini perlu juga Pak dimaksimalkan, di level menteri, Pak. Misalnya dalam persoalan KAI, kerumitan KAI dengan Kementerian Perhubungan, misalnya. Di sana ada banyak isu yang sebenarnya harus diselesaikan, kalau menurut saya itu *problem*-nya besar sekali. Itu memerlukan level menteri kalau menurut saya ya, karena jadi repot *gitu*.



Dan itu terjadi *kan* tidak hanya dengan kementerian-kementerian seperti itu, *tapi* dengan kementerian teknis yang lain juga banyak, Pak, dan ini nanti *kan* bisa jadi masukan untuk pemerintahan baru supaya pada awal pemerintahan baru sudah teridentifikasi dan mungkin sudah terselesaikan nih, apa namanya *mismatch* maupun gap antara kementerian teknis dengan BUMN. Itu saya kira sangat penting.

Lalu yang keempat, itu akhir tahun lalu *kan* ada temuan BPK, ya, Pak, ya, yang 11 itu, 11 BUMN bermasalah. Kita harapkan ada *progress* yang kita tahu ya untuk isu-isu itu, karena lagi-lagi ini jadi *lesson learned* kita, Pak, itu sebenarnya tujuannya *gitu* ya, supaya ada narasi yang kita bangun, bahwa hal seperti ini tidak akan dibiarkan *gitu*, Pak, ya.

Lalu yang terakhir kalau dari saya, Pak. Ini *problem* kita di penerbangan, Pak. Itu sekarang *kan* tiket memang mahal minta ampun, Pak. Jujur saja apalagi ke daerah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Pak. Banyak proyek-proyek besar, saya kurang tahu kalau daerah lain.

Tapi ke sana, Pak, kayak ke dapil saya, Pak, orang cari tiket untuk kembali dari Jakarta, itu bisa satu bulan baru dapat, Pak. Saya sudah *ngobrol* dengan Garuda, dengan Citilink, mereka memang terkendala pesawat.

Nah, apakah mungkin Pelita Air masuk, Pak, untuk ke sana? Karena *kan* ini memang *demand*-nya tinggi sekali, Pak, untuk ke Balikpapan dan ke Kaltara itu, karena ada PSN-PSN di sana, ibu kota baru dan PSN *gitu* ya, ini perlu, Pak, diperhatikan, apakah Pelita Air bisa diajak ke sana, Pak. Karena rakyat juga menjerit, Pak. Tiket yang biasanya di bawah 1 juta, sekarang bisa 2,8 juta, Pak. Jadi, memang di *sellingnya udah* harga itu, Pak.

Dan dengan tidak adanya penambahan pesawat, tentu yang swasta *kan* tidak mau *nambah* pesawat supaya harga tiket maksimum, habis dan kursi *full gitu*. Nah, akhirnya, mobilitas orang terganggu dan ujungnya *kan* ekonomi juga, Pak.

Nah, saya kira itu saja dari saya. Tetapi terakhir, Pa,k hanya *sekedar* seruan saja. Kalau saya mengamati, banyak *corporate culture* kita yang juga belum *terbenahi* dengan baik, terutama di *middle management* dan ini *kan* hanya *copy paste aja* dari yang senior-seniornya, jadi tidak banyak perubahan saya lihat di berbagai BUMN. Ini menjadi tantangan serius juga buat kita, karena kalau anak-anak muda masuk nanti, yang punya kreasi, inovasi akhirnya kembali lagi ke *back to default*, enggak bisa *ngapa-ngapain* juga, Pak. Ini saya kira masalah penting yang harus kita bahas bersama.

Begitu, Pimpinan.

Terima kasih, Pak Menteri.



KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Deddy.

Selanjutnya, Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ke sayap kiri *dulu*, Pak Martin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sayap kiri belum ada yang daftar.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oh, belum ada yang daftar?

Baiklah, Pak Menteri.

Baik, Pak Martin, terima kasih.

**Pak Martin, Pimpinan kami,
Seluruh Anggota DPR RI yang saya hormati,
Pak Menteri dan jajarannya,**

Ada berapa hal saja, Pak Menteri, yang bisa menjadi masukan. Pertama, tadi ada kami kedatangan dari teman-teman Serikat Pekerja yang merupakan bagian dari *Building and Wood Workers International* yang menyampaikan kepada kami bahwa masih banyaknya pekerja-pekerja yang bergerak di bidang, merupakan subkontraktor ya, dari karya-karya itu, menerima upah masih di bawah UMR.

Mungkin, ini yang perlu Pak Menteri dan jajaran memastikan bahwa dan proyek itu banyak di bawah Waskita, PP dan Adikarya ya. Jadi, ini yang diminta, bagaimana ke depan, Pak Menteri dan jajarannya, melakukan fungsi pengawasan memastikan karya-karya yang berkontrak dengan perusahaan subkonnya, itu dipastikan para pekerja subkon itu, tukang-tukang yang bekerja di subkontraktor itu dibayar pasti di atas UMR.

Nah, itu masukan, Pak Menteri. Nah, ini laporan mudah-mudahan ini jadi catatan bagi Pak Menteri, sehingga kita pastikan pekerja-pekerja kita ini bekerja bisa memenuhi kesejahteraan keluarganya.

Yang kedua, saya mau menanggapi soal kisruhnya pesawat haji Garuda, Pak Menteri. Jadi memang, itu terlihat bahwa sebenarnya Garuda itu membutuhkan tambahan pesawat *wide body* ya, berbadan lebar tambahan, *tuh* Pak Tiko yang sudah *ngangguk-ngangguk* itu, sehingga, karena apa, salah satu bisnis Garuda yang menguntungkan itu adalah umrah dan haji, ya.



Itu bisnis yang menguntungkan Garuda, selain saya tahu Pak Menteri fokus bagaimana perusahaan penerbangan domestik kita seperti Garuda, Citilink, maupun Pelita Air Service *kan* untuk pasar domestik, karena terus-terang Indonesia ini masih butuh pesawat. Jumlah pesawat kita baru 300 atau 400, padahal kebutuhan kita 700 pesawat.

Saya memahami kebijakan Kementerian BUMN untuk fokus domestik, karena kita masih kurang pesawat, sehingga yang disampaikan Bang Deddy tadi, kenapa harga tiket mahal, karena memang pesawat kita kurang, terutama pesawat punya milik pemerintah. Nah, harapan kita tentu pesawat ini bisa bertambah.

Nah, di luar itu, saya ingin menyampaikan bahwa terlihat sekali Garuda selain butuh tambahan pesawat untuk domestik, tapi juga butuh pesawat berbadan lebar untuk umrah dan haji. Dan itu kalau secara hitung-hitungan, menurut saya enggak mungkin rugi, Pak Tiko dan Pak Menteri. Karena, kita dianugerahkan sebagai bangsa yang mayoritas umat Islam, yang mau dan punya semangat luar biasa untuk berhaji dan umrah ya, bahkan di daerah lain bisa puluhan tahun, 40 tahun orang *ngantri* haji.

Jadi, ini pasar, ya kalau, mohon maaf ya, dalam hitung-hitungan Garuda, ini pasar yang tidak mungkin rugi, Garuda. Apalagi sampai sekarang kan Emirates A380 enggak masuk di, enggak masuk ke Soekarno Hatta, sehingga saingan berat Garuda enggak ada. Nah, ini tolong dijadikan kajian oleh Kementerian BUMN bersama Garuda, agar Garuda bisa mendapat tambahan pesawat lebar baru ya, sehingga ke depan, rutenya bisa ditambah, karena ini pangsa pasar yang, ceruk yang bagus bagi Garuda.

Yang kedua, tidak lagi waktu musim haji, Garuda ini saya dengar pontang-panting mencari pesawat sewaan yang berujung pelayanannya tidak maksimal untuk haji reguler, *kan* kasihan, Pak Menteri. Mereka sudah *ngantri* puluhan tahun, rata-ratanya usianya sudah tua, karena Garuda kesulitan mendapatkan pesawat waktu musim haji, pesawat sewaan pada musim haji, mereka akhirnya pelayannya enggak maksimal. Harusnya jemaahnya berangkat hari ini tertunda besok atau harusnya berangkat pagi, jadinya malam.

Nah, ini harapan kami, ini tolong dipertimbangkan oleh Kementerian BUMN bersama Komisararis Garuda dan juga manajemen Garuda.

Itu saja. Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih, Pak Menteri. Mudah-mudahan bermanfaat.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, ke kiri, Pak Hakim.



F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI,
Teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Tohir, beserta
Seluruh jajaran Kementerian BUMN,**

Ada tiga hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, mungkin ya ini patut diapresiasi, Pak Erick. Karena, trennya tiap tahun kontribusi *deviden* BUMN terhadap negara selalu meningkat tajam kontribusinya, saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas kinerja yang luar biasa dari Kementerian BUMN.

Kemudian yang kedua, Pak, ini *kan* memang beberapa Kementerian ada penyusunan anggaran untuk 2025. Nah, mungkin nanti untuk pembahasan di berikutnya, bisa diberikan paparan proyeksi, kalau misal ternyata usulan tambahan diterima, kira-kira proyeksi *deviden* yang diberikan berapa, pajak dan juga PNBPN, seperti biasanya *loh*, Pak, *kan* biasanya di paparannya Kementerian BUMN ada proyeksi-proyeksi seperti itu.

Nah kira-kira, kalau usulannya disetujui, berapa banyak, dan kalau memang ternyata tidak disetujui, kira-kira *deviden* yang akan diberikan, pajak, dan juga PNBPN yang diberikan, kira-kira berapa proyeksinya. Itu poin yang kedua.

Kemudian poin yang ketiga, Pak Erick. Ini di bagian PMN, tapi mungkin saya di PMN yang dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 ini. Ini *kan* alokasi cadangannya ada 13,6, namun yang saya lihat di sini itu, kalau saya total dari yang sudah konfirmasi ke Kemenkeu itu ada 4,6 triliun dan yang dari pembahasan ada 6 triliun. Jadi, total 10,6 triliun, berarti ada sekitar 3 triliun yang belum ada di paparan ini, alokasinya ke mana.

Dan kami sedikit lupa, Pimpinan, untuk yang dari cadangan investasi ini yang sudah mendapatkan konfirmasi dari Kemenkeu, sudah ada pembahasan belum ya, terkait nanti alokasi PMN-nya, baik dari yang KAI, INKA dan juga HK, untuk apa dan seperti bagaimana penggunaannya?

Mungkin, nanti di lain kesempatan bisa diberikan paparan yang secara komprehensif kepada kita atau mungkin setelah pembahasan di Kementerian Keuangan, Pak Erick, seperti itu. Dan yang ada 3 triliun itu akan dialokasikan ke mana.

Kira-kira tiga poin itu, Pimpinan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir.

Terima kasih.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Nyoman Parta, silakan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan, dan
Seluruh Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri, dengan seluruh jajaran,**

Sama dengan teman-teman yang lebih awal, saya memberikan apresiasi atas setoran *deviden* kepada negara yang setiap tahun bertambah bahkan direncanakan tahun 2024 rencananya 85 T. Jadi, terima kasih telah bekerja keras untuk menambah *deviden* kepada negara.

Namun di sisi prestasi, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, kalau urusan rencana anggaran, karena memang *slot* anggarannya tidak besar, sama dengan teman-teman yang lebih awal saya memberikan dukungan maupun persetujuan terhadap anggaran itu, yang lain saya ingin memberikan semacam pertanyaan. Kenapa ketika zaman Pak Erick juga, dengan *tagline* akhlak juga tidak mampu menghentikan korupsi di beberapa BUMN yang ada, yang Pak Erick Pimpin.

Contoh misalnya, dalam kasus Antam itu, terjadinya juga di tahun, di samping dari tahun 2010, berakhirnya di tahun 2021. Ini luar biasa, dari hasil kami mengumpulkan informasi, ternyata logo-logo yang diberikan atas nama Antam itu ternyata juga emasnya ada yang berasal dari tambang ilegal. Itu yang satu.

Yang kedua, yang menggelikan sebenarnya, urusan Indofarma. Jadi, dibololnya dana BUMN ini justru karena ada kerja sama dengan *pinjol*, Jadi ini luar biasa ini. Bukan saja menurut saya tidak profesional, tapi, tapi luar biasa jahatnya, jadi luar biasa jahatnya melakukan itu. Kerja samanya dengan *pinjol* akhirnya menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan farmasi yang dimiliki oleh negara. Menurut saya, hal yang seperti ini tidak boleh lagi terjadi, Pak Menteri.

Selanjutnya, karena kesempatan ketemu Pak Menteri jarang, di gedung ini, di tempat ini, Pak Menteri pernah berjanji akan meresmikan KEK Sanur Mei 2023. Sama juga, bersamaan dengan Pelindo Benoa Bali, *Bali Maritime Hub*.



Saya beberapa kali masuk KEK Sanur, khususnya yang sekarang dari KEK Sanur khusus untuk *Bali Beach* dan *The Meru* di bawah *The Sanur*. Saya melihat cara pengelolaannya tidak baik, tolong ini dicek dengan baik. Urusan kecil *aja*, Pak Menteri, saya tidak tahu apa yang melatar belakangi. Kenapa kunci kamar di Hotel *Bali Beach* itu ada merk *The Meru*-nya, padahal kan hotelnya berbeda. Coba dicek itu, termasuk juga alat peraganya, jadi untuk brosur dan lain sebagainya.

Terus selanjutnya, urusan di bawah KEK Sanur itu, urusan rencana BUMN membuat rumah sakit yang bekerja sama dengan *Mayo Clinic*. Sampai hari ini enggak ada kabar itu, kapan rencana realisasi lapangannya juga tidak banyak *progress*-nya.

Dan selanjutnya adalah urusan Pelindo, Pak Menteri. Karena, banyak informasi yang saya dengar bahwa proses pembangunan pelaksanaan kelanjutan rencana bisnis di Pelindo itu stagnan, tadi saya ke sana sebelum ke *airport* saya mampir di Pelindo. Ya memang, setelah selesai reklamasi ada pembangunan dan setelah itu memang stagnan.

Janji Pak Menteri meresmikan 2000, bulan Mei 2023 sudah lewat, sudah lewat. Dan yang paling, paling menurut saya, urusan sertifikat laut yang direklamasi *aja* belum selesai, karena HPL-nya belum selesai, otomatis HGU pun enggak bisa. Kalau HGU enggak bisa, seluruh perizinan enggak ada, enggak bisa dilanjutkan.

Jadi, kalau sudah seperti itu, pembangunan apa yang akan muncul di situ? Dan yang paling mengganggu menurut saya, saya lama mendengar bahwa telah ada kerja sama Pelindo dengan PT Kaja ya, yang akan menjadi vendor atau pengelola vendor di Pelindo. Salah satunya kan kalau *Bali Maritime Hub* itu bisa tumbuh kalau marinyanya terbangun. Enggak ada gambar marina akan terbangun di sana sampai hari ini, enggak ada sama sekali. Kalau marina tidak tumbuh, ya bagaimana yang lain-lainnya akan tumbuh, karena itu menjadi ujung tombaknya. Saya mendengar sudah ada kerja sama dengan PT Kaja, tapi apakah PT itu tidak profesional, tidak pernah punya pengalaman mem, membangun marina, sehingga sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa proyek itu akan dimulai.

Dalam kesempatan ini saya mohon sebagai wakil rakyat Bali, karena Pelindo itu reklamasinya juga kita perdebatkan panjang waktu itu, karena sekarang sudah terwujud reklamasinya, agar ada bisnisnya di situ berlanjut.

Kira-kira itu, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sudah?



Pak Jon, silakan.

F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

**Pimpinan, dan
Teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri yang kita banggakan,
Pak Wamen, Pak Tiko,
Pak Sekjen,
Pak Arya yang kita kangen, serta
Semua yang mendampingi,**

Pertama, tentunya apresiasi yang dalam, Pak, karya Kementerian BUMN sampai hari ini boleh kita angkat dua jempol, Pak, *two thumbs up*. Karena, saya lihat aksi-aksi korporasi sejak awal yang dilakukan, kelihatan sekali hasilnya luar biasa. Tentu kita sadar, ini belum bisa semuanya teratasi semuanya berkembang, *tapi* kalau kita lihat pertumbuhan atau *growth*-nya itu menaik terus.

Nah, ini memang besar harapan kami, saya dan teman-teman Komisi VI tentunya, ini ada keberlanjutan. Tim yang Bapak bangun ini menurut saya sudah sangat pas. Nah, mudah-mudahan ke depan masih bisa dipertahankan tim ini dan bisa berjalan lebih baik lagi. Saya melihat peluang itu sangat besar.

Nah, kedua, hal yang berkaitan dengan anggaran, saya prihatin sebenarnya. Prihatin karena, kalau kita melihat, Pak, di sistem penganggaran kita, judulnya saja *founding father tuh* sudah menerangkan APBN. Saya mengulangi lagi beberapa kali kesempatan saya sampaikan, Anggaran Penerimaan Belanja Negara. Artinya, pada saat wacana atau pembahasan APBN ini pada masa lalu, tentu yang diharapkan penerimaan ini dulu diprioritaskan, baru belanja *kan?* Tentu kita tidak menafikan program-program belanja *gitu, tapi* yang paling sulit ini kan mencari penerimaan *dulu*.

Nah kebetulan, Komisi VI ini adalah salah dua dari komisi-komisi yang ada, yang *ngurusin* penerimaan ini. Yang belanja *udah* banyak, Pak, ada sembilan, sembilan komisi yang *ngurusin*, yang mengurus penerimaan hanya kita dan penerimaan itu sedikit sekali *item*-nya.

1. Yang berkaitan dengan pajak;
2. Berkaitan dengan PNB;
3. Dividen, Pak.



Inilah hari ini yang perlu kita bicarakan serius, mudah-mudahan di program ke depan ini bisa kita angkat, karena apa? Presidennya Pak Andre ini *kan* sudah mencanangkan di atas 5%, bahkan diharapkan 7% pertumbuhan. Bisa dicapai itu, tapi tanpa peran BUMN saya yakin *hutang* akan semakin meningkat, karena hanya bisa ditutup dengan *hutang* atau pajak ditingkatkan lagi yang sekarang sudah naik 12% harus naik lagi. Ini akan menyulitkan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, saya berpikir, Pak, untuk ke depan ini, mungkin anggarannya Bapak ajukan semaksimal mungkin, tapi *return*-nya juga katakanlah misalnya kita bicara dengan deret ukur, kita *naikin* jadi dua kali lipat, nanti *return* atau *deviden* yang dibagikan menjadi 150 atau 170 triliun. Nah, itu kenapa enggak? Dan saya melihat selalu yang dikurang-kurangi urusan penerimaan ini, padahal ini urusan yang sangat penting.

Nah, oleh karena itu, ini Pimpinan, barangkali kita juga harus betul-betul membahas juga, ajak *join session* dengan Komisi XI, duduk bersama Ibu Menteri Keuangan *gitu*, kalau enggak, ini enggak selesai-selesai, selalu saja dan saya dengar juga, karena nanti ada transisi pemerintahan. Kemarin kami membahas RKA K/L, ada transisi. Jadi ada 30 sampai 40% masih belum dipastikan dulu. Isunya karena supaya nanti pemerintahan baru bisa mencanangkan untuk program yang mereka akan lakukan. Menurut saya ini bagus, *tapi boleh aja diplot dulu kan*, nanti direvisi, enggak harus enggak jelas *gitu loh*.

Nah, ini juga poin penting yang menurut saya memang harus kita lakukan. Jadi, saya enggak berpanjang lebar, tentu kita sangat mendukung. Dan sebenarnya prihatin program usulan tambahan dan kalau bisa memang kita cari juga *slot* untuk menambah lebih besar lagi, dengan *reason* tadi, Pak, kalau *clear* disampaikan, *oke* tambah lagi misalnya 30-40%, nanti komitmen BUMN akan membagikan *deviden* naik juga 30-40% ke depan.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Jon.

Kita ke kiri, ada Pak Doni Akbar.

Katanya mau *ngomong*.

F-PG (DONI AKBAR, S.E., M.M.):

Terima kasih.



**Pimpinan, dan
Anggota, juga
Pak Menteri BUMN, beserta jajaran,**

Sebenarnya saya tadi tidak mendaftar, Pak, cuman karena sudah didaftarkan, ya saya berbicara sedikit.

Memang apa yang ingin saya sampaikan *tuh* sedikit, Pak, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Jon tadi, Pak. Mungkin, perlu ada lebih mendalam pembahasan terkait *deviden*, Pak.

Sudah itu yang kedua ini, Pak. Saya *kan* lihat ada tambahan usulan PMN 2025 ya, untuk Wijaya Karya itu *kan* restru itu, Pak, ya. Nah, saya juga dengar, eh apa, *sorry*, untuk WIKA ini restru. WIKA Realty itu katanya mau dikembalikan ke HIN atau bagaimana, Pak, ya? Kalau saya enggak salah, sempat ada dengar seperti itu. Kalau memang seperti itu, terus bagaimana nasib direksi dan karyawan yang ada di sana?

Itu saja dari saya, Pimpinan. Karena, saya enggak semangat, Pak. Usulannya, pagunya kecil BUMN ini. Jadi kurang *gimana gitu*, kalau dua kali lipat, saya agak, agak bersemangat.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Walaikumsalam,

Silakan, Pak Darmadi.

F-PDIP (PROF (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pak Menteri Erick Thohir, sudah lama enggak ketemu,
Pak, dan jajarannya,
Pak Tiko,
Pak Arya,**

Memang betul kata Pak Doni, Pak. Kita ini kurang semangat, jadi perlu juga motivator, motivasi dari Pak Erick. Saya lihat *tuh* memotivasi pemain bola, jadi bukan hanya pemain bola *aja* yang dimotivasi, Pak. Bapak nanti suatu saat motivasi kami, Pak. Berdiri di tengah, Pak, saya lihat bagus, Pak, kata-kata motivasinya. Tapi kalah berapa kali *nih*, Pak, *gimana*, Pak? Begitu kasih hadiah, *kok* kalah terus, Pak. Iya, Pak Andre, masih kalah terus *nih*, Pak Andre. Menang ya? *Oke*.



Apresiasi Pak Erick, empat tahun ini pencapaian ini tahun terakhir, enggak tahu ini rapat terakhir dengan Pak Erick bukan *gitu*? Enggak, ini. Bukan, di akhir ini, di akhir ini, terakhir mungkin ya, karena tinggal 4 bulan ya. Oh PMN ya masih ada, oh masih ada. *Tapi* saya yakin nanti kita bertemu lagi, Pak. Menurut info Pak Andre, masih Menteri BUMN, Pak. Info Pak Andre. Jadi, kita berharap lanjut, Pak. Apresiasi juga *deviden* dan sebagainya, bagus.

Saya ingin menyoroti berbagai banyak kasus yang muncul terakhir. Dari Telkom, di Telkom *kan* ada *kan*? ya, di Telkom juga pengadaan fiktif ya, PGN, Indofarma, Timah. Pak Menteri, Timah, Antam, Kimia Farma, PGN yang sudah tersangka ya. BUMN Waskita Karya, BUMN karya, banyak, Pak. Sampai BSI kemarin, Pak, terkait penarikan dana 13 triliun, ya. Ini muncul terakhir *nih*, Pak Erick. Saya enggak tahu, Pak, ini kenapa muncul terakhir ini.

Ini, kemudian, kita kaitkan dengan pengawasan BUMN. Ini *kan* saya lihat anggarannya cukup, mau dinaikkan cukup banyak di pengawasan, 122,8 miliar ya, rencana, tambahannya banyak buat pengawasan. Kira-kira Pak Erick, apa perubahan yang Bapak ingin lakukan sehubungan dengan pengawasan? Ini nanti bisa diceritakan, Pak, karena *kan* munculnya banyak *nih*. Ada yang pengadaan fiktif itu di mana itu ya, Telkom, kalau enggak salah. Pembelian fiktif menurut Kejaksaan, barangnya enggak diserahkan, Pak, ya di PGN, ya. Antam juga bermasalah, Timah apalagi, Pak. Ya, saya tahu banyak yang Bapak laporkan juga *kan* ya, tapi ini harus ada perubahan pengawasan.

Nah, ini nanti mohon dijelaskan, kira-kira konsepnya seperti apa, Pak. Nanti supaya lebih *prudent*, lebih *GCG*, *gitu* ya. Ini penting, Pak, munculnya bersamaan di akhir periode Bapak ini, Pak. Ya, muncul terus ini kasus-kasus ini. Nah, jadi tentu kita berharap poin ini menjadi, nanti yang bisa Bapak jelaskan.

Yang lain, saya pikir sudah ditanya teman-teman, jadi saya enggak terlalu banyak ya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, makasih.

Habis ya.

Pak Adi? *Oke*, Pak Adi.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTIO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang kami hormati Pimpinan,
Rekan-rekan Komisi VI,**



**Pak Menteri,
Pak Wamen, dan jajaran,**

Pertama, terkait anggaran, walaupun tidak besar, Pak Erick ya, ini bukan soal besar kecil saya rasa, tapi penyerapannya bagus sekali, apresiasi berarti dari segi *planning* dan juga *disbursement*, ini disiplin. Semoga bisa terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

Terkait PMN, Pak Menteri, ya kita tentu selalu mendukung, apalagi kalau penugasan dari pemerintah. Tapi tentu namanya PMN, esensinya *kan* ini seperti penambahan ekuitas kalau di swasta, jadi parameter-parameter tentu harus tetap kita perhatikan, karena ini layaknya suatu bisnis. Jadi, pengawasan terhadap pengembalian atau *return on equity*, tentunya kalau *equity* secara keseluruhan karena sudah ditambah dengan yang lalu-lalu, ini sangat, sangat kecil pastinya. Apalagi seperti Hutama Karya, ini *kan* ekuitasnya besar sekali ya. Sampai *year to date*-nya *udah* berapa PMN yang dari Hutama Karya? Mungkin 100 T lebih kali, Pak, ya? 90 ya? Nah, makanya, itu mungkin sudah melebihi sebagian dari Bank Himbara juga kali. Jadi kalau kita lihat ROE-nya, pastinya tentu kecil.

Tetapi kalau *by project*, mungkin yang sifatnya pengembangan usaha, perlu diperhatikan juga *return on equity*-nya setiap permintaan ini, supaya manajemen juga dalam mengusulkan PMN untuk suatu *project* pengembangan usaha tetap memperhatikan *return on equity* yang jelas dan *make sense* ya. Bagaimanapun juga ini *kan* suatu bisnis. Saya paham kalau penugasan-penugasan pemerintah ini tidak bisa dinilai hanya dengan parameter pengembalian ekuitas karena ada hal-hal lain, dampak terutama untuk masyarakat, yang saya kira positif.

Saya kira itu untuk PMN dan tadi teman-teman juga sudah menyampaikan, masih banyaknya kasus-kasus hukum terjadi di beberapa BUMN. Kita bukan menyalahkan, karena juga kejadian ini *kan* juga mungkin sebelum masa Pak Menteri di sini, baru, apa, diangkat permasalahannya sekarang. Tapi intinya, saya kira *risk management* ke depan perlu diperketat dari Kementerian, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi.

Mungkin itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Walaikumsalam,

Sudah ya?



Baik, sebelum saya kembalikan ke Pak Menteri, ada beberapa hal dari saya, Pak Menteri.

Satu, turun 18% *nih*, hebat juga *nih*. Yang lain-lain turun 30, 40, kemarin ada yang 50% *tuh*, Pak, waktu kita *konsinyering*.

Nah, menurut saya ini ada beberapa hal ya. Kalau memang itu mau dicadangkan, saya setuju sama Pak Jon tadi, harusnya jangan kelihatan langsung turunnya drastis begini semua. Menurut saya, ini bisa menimbulkan persepsi yang keliru, Pak Menteri. Ya, kalau ada sampai kementerian turun 50%, ini karena rapat tertutup, saya enggak bisa buka di sini, ya. Bahkan ada, waktu kemarin *konsinyering* rapat tertutup, yang sampai mengganggu ke operasional. Jadi, menurut saya, ini bisa menimbulkan persepsi yang keliru, kalau sampai mengerem pengeluaran seperti ini. Tadi *kan* pendapatan dan belanja negara, kalau mengerem belanja negara seperti ini, berarti satu, ada belanja negara yang menyedot KL lain atau dua, penerimaan negara turun. Nah, ini *kan* bahaya, Pak.

Jadi kalau menurut saya, saya setuju dengan Pak Jon tadi. Walaupun itu dicadangkan untuk pemerintahan yang baru, *toh* juga nantinya akan ke sini juga, ke DPR juga.

Jadi saya membayangkan, setiap menteri sekarang ini *kan* rapat dengan komisinya masing-masing. Ya, kalau setiap menteri melaporkan turun 30, turun 40, ada yang turun 50, itu seperti apa persepsi pasar? Itu menurut saya perlu dihitung, Pak. Jadi kalau rapat kabinet, Bapak bisa suarakan juga *nih*. Enggak bagus menurut saya untuk persepsi terhadap ekonomi Indonesia, Pak, di tengah tantangan global dan segala macam, yang saya enggak usah cerita lagi di sini.

Nah, yang kedua, Pak Menteri. Kemarin juga kami pas diskusi dengan Pak Sesmen, juga kawan-kawan, mengenai pengawasan BUMN yang menurut saya juga penting untuk kita kasih perhatian. Di mana saya lihat anggaran pembinaan BUMN untuk tiap Asdep itu ada 30 sampai 50% dari tiap anggaran yang ada di Asdep.

Nah, kemarin saya tanya, apakah ini sudah masuk ke dalam pengawasan ataukah perlu supaya lebih *day to day basis*, ada semacam *desk* khusus untuk pengawasan BUMN yang tentunya berarti harus dianggarkan, ada konsekuensi anggarannya.

Saya cek di anggaran inspektorat, *kayaknya* ini tidak mungkin dilakukan dengan hanya 2 miliar. Nah, tapi ada di usulan anggaran yang kalau di total itu mencapai 122 miliar. Apakah ini sudah termasuk? Kalau sudah termasuk, mungkin Pak Menteri bisa ceritakan seperti apa nanti efektivitasnya, sehingga nanti bisa memberikan semacam *early warning system* bagi tiap permasalahan yang ada di BUMN.

Jadi, tidak kemudian setelah menjadi masalah, lalu heboh *gitu* ya, kita heboh. Jadi kalau ini memang sudah termasuk, seperti apa mekanismenya?

Kalau belum termasuk, menurut saya, sekalian saja dibuat semacam *desk* pengawasan untuk BUMN.

Nah yang ketiga, Pak Menteri, untuk PMN. Saya harap dari kalau di luar penugasan ya, yang PMN-PMN ini memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Misalnya contoh yang PMN ke IFG terkait dengan Jiwasurya, penyelesaian Jiwasurya.

Kemarin, kita mendengar di berita bahwa hasil lelang Jiwasurya juga ternyata ada *underprice* ya, istilahnya begitu ya. Jadi ini, apakah ini akan berpengaruh terhadap penyelesaian Jiwasurya? Karena, sudah berapa tahun ya berarti? Itu di awal periode, berarti sudah hampir 5 tahun juga, Pak Menteri.

Ini kita harus bisa menyelesaikan. Jangan sampai nanti di apa, diteruskan ke periode yang baru, *gitu kan*. Kalau bisa di sini sudah selesai, sehingga ini apakah pengaruhnya lelang aset Jiwasurya yang diduga ya, di bawah harga nilainya dan apakah PMN ini nanti akan bisa, ya cukup *gitu*.

Nah yang kedua, juga PMN terhadap KAI, tapi mungkin nanti ini dialami bersama KAI, tapi bisa jadi masukkan untuk Pak Menteri. Dari pengadaan *trainset* yang baru seperti yang diusulkan ini, saya mendapatkan informasi dari para pengguna kereta api, karena tidak adanya atau tidak cukup untuk perbaikan kereta yang ada sekarang, *trainset, kan* itu hanya dua kalau enggak salah yang akan dikerjakan oleh INKA, sementara ada 19, yang *operating, 2*, berarti 17 ini tidak bisa melayani.

Nah, berarti kalau skema PMN ini sampai 2027, kalau enggak salah, untuk menyelesaikan masalah di KAI ini, berarti dari 2024 sampai 2027 jumlah kereta yang beroperasi di *commuter line* akan jauh, Pak, di bawah *demand* penggunanya.

Nah, saya khawatir, Pak, dalam waktu dekat ini, apa, pengguna *commuter line* yang sudah bertumpuk-tumpuk dengan pengurangan *trainset*, ini akan *semakin* bertumpuk-tumpuk, Pak. Jangan nanti viral juga, Pak. Jadi, itu *kan* banyak tuh meme-meme yang sampai orang bertumpuk-tumpuk sampai ke atas atap kereta *tuh*, Pak.

Nah, ini menurut saya perlu dicari jalan keluarnya, Pak, karena tidak mungkin pengguna *commuter line tuh* dilayani dengan jumlah *trainset* yang berkurang. Jadi, harus ada solusi antaranya, bagaimana itu terjadi, mungkin Pak Menteri bisa *exercise* dengan KAI atau dengan, saya dengar itu juga ada kaitan dengan BRIN ya, karena apa, terkait dengan risetnya, saya juga kurang paham lah, teknis untuk apa, *trainset* yang ada sekarang ini bisa beroperasi.

Nah, yang keempat, Pak Menteri, juga agenda-agenda yang tersisa, walaupun masa jabatan sampai Oktober ini. Saya dengar AP sudah akan gabung, *congratulations*, Pak. Itu sudah satu langkah maju, sehingga kita harapkan Angkasa Pura akan *semakin* efisien dan juga bisa punya kapasitas yang lebih besar. Tapi jangan lupa juga, Pak, masalah karya-karya. Karya-



karya ini, kita dalam rapat kerja ini berapa kali, Pak Menteri sudah utarakan, sebenarnya sudah ada *plan*, *tapi* kita belum pernah membahas di sini bagaimana skema penyelesaian karya dan juga di Rekind ya, Pak? Ya Rekind, terakhir juga kami rapat dengan Pak Tiko. Nanti mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan.

Jadi saya pikir itu agenda-agenda yang tersisa.

Bentar ya Bu ya, *oke, oke*. Sebelum saya kembalikan, Bu Rika katanya 2 menit.

F-PDIP (Dr. RIEKE DIAH PITALOKA S.S., M.Hum.):

Dua menit dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPR RI,
Menteri BUMN beserta jajarannya,**

Saya hanya ingin mengingatkan, Pak Menteri, dan juga Pimpinan, dan juga Sekretariat, kita punya *hutang* untuk membahas persoalan PT Taspen. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan berita soal Tapera, ada dana Bapertarum dari Taspen yang dialihkan ke Tapera milik sekitar 5 koma sekian juta PNS. Dana perumahannya itu dialihkan dari Taspen.

Nah, tentu saja, Tapera itu bukan mitra Komisi VI, tetapi Taspen di bawah BUMN, mitra Komisi VI. Kami membutuhkan informasi proses pengalihan itu, dan tentu saja kita ingin memperdalam juga persoalan ada masalah investasi fiktif sekitar 1 triliun yang sudah diangkat di media, yang dilakukan oleh oknum di Taspen yang juga sudah sekarang dalam penanganan hukum.

Demikian.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Bu Rieke, *makasih*.

Tadi saya *cariin* Ibu, *kan* katanya di belakang.

Oke, cukup ya dari kita semua? Saya kembalikan ke Pak Menteri. Silakan, Pak.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Terima kasih tadi atas saran, solusi, yang tentu memang kami sangat memerlukan di kementerian.

Saya terus-terang, tidak malu buat berulang-ulang kali bicara. Sebenarnya, apa yang kita diskusikan itu 50-60% sebenarnya ada payungnya di RUU BUMN, yang saya masih menunggu dan memang, ya kami coba melakukan terobosan-terobosan yang kita coba.

Misalnya tadi, bicara mengenai tanah di Benoa yang masih HPL dan itu aturan utamanya memang, ternyata setelah kita investasi besar-besaran, ternyata sertifikatnya bukan di kita. Nah, ini menjadi kondisi yang lain atau di perhubungan, di perhubungan *gitu*, atau bicara misalnya *policy* penerbangan. Ya di mana kita mengerti, kita punya keterbatasan jumlah pesawat. Ketika kita mau *shifting* ke domestik, *tapi* ada *quote and quote* di mana mengenai *tourism* yang akan didatangkan dari luar negeri, kalau penerbangan kita *shifting* semua ke domestik, kita fokus ke domestik. Karena memang realita, kita hanya punya 400 pesawat, kebutuhan nasional itu 700.

Nah, ini tidak berarti kita tidak melayani umrah dan haji, *tapi* itu *realita* yang kita hadapkan. Ya, ketika kita tidak bisa terbang, *gimana* kompensasi pesawat yang lain bisa datang ke Indonesia? Nah, ini ada aturan-aturan seperti ini yang ini.

Atau tadi yang diangkat mengenai penugasan-penugasan. Ya memang suka tidak suka, ya kita coba lakukan kondisi, ya seperti yang sudah berhasil dengan Kementerian ESDM dan Ibu Menkeu mengenai solusi, misalnya pembayaran kompensasi buat listrik dan BBM, sehingga kita bisa paling tidak Pertamina, PLN bisa punya neraca keuangan lebih sehat untuk dia juga menginvestasikan lagi, untuk tentu penemuan sumur minyak ataupun untuk misalnya pembangunan energi terbarukan yang hari ini juga memerlukan modal yang sangat besar.

Kendala ini memang, salah satunya memang ya solusinya di RUU BUMN itu, yang kita harus bisa kembali, mohon dengan segala kerendahan hati bisa didorong. Tadi disampaikan bagaimana ada *joint* diskusi, apakah VI dan XI, Komisi VI dengan XI, itu saya rasa itu sangat penting *gitu*. Karena ini kalau *deadlock* seperti ini, memang akhirnya kita sendiri ya, akhirnya bolanya balik ke kita lagi.

Kita coba, ada satu *success story*, misalnya mengenai Borobudur. Borobudur itu sekarang kita sudah menunggu Perpres. *Single authority* di mana Borobudur itu yang tadinya diawasi oleh berbagai kementerian, ya sekarang *udah* akan dikasih ke *single authority* ke kita.

Nah, memang, para kementerian akan punya wakil. Nah, karena terbukti, dengan kemarin misalnya, kita menyelenggarakan perayaan Waisak yang kedua, ketika itu menjadi *single authority*, itu lihat sekali bagaimana Borobudur itu ke depan akan menjadi salah satu destinasi tidak hanya wisata, *tapi* juga sebuah nilai-nilai spiritual yang memang dilahirkan seperti itu.

Nah, kita coba, tapi memang payung hukumnya kalau saya *deal* satu-satu di tiap kementerian, ini yang memang menyulitkan. Dengan Kementerian ESDM kita sukses mengenai kompensasi, kita juga kemarin sama Kementerian ESDM mengenai RUPTL PLN, ini pertama kali ada kesepakatan.

Karena memang, *kan* sebaiknya disampaikan oleh Pimpinan Komisi VI, dan Wakil Rakyat Komisi VI, ketika kementerian lain membikin *roadmap*, tanpa melibatkan kami. Bukan berarti kami ingin dilibatkan terus-menerus. Ya tentu, realita di publiknya *kan* kami yang lebih *ngerti* sebagai tangan pemerintah, karena kita bersentuhan langsung ke *market*, ke masyarakat. Apakah itu bicara misalnya, ini bukan kembali mau jadi sebuah *issue* yang baru. Misalnya, *policy* mengenai pembiayaan perumahan. Nah, itu, ya kami sangat *welcome* kalau kami, Kementerian, BTN, dilibatkan untuk mencari solusi, apakah *mortgage* 20 tahun, 10 tahun.

Nah, ini, nah ini, yang tentu kita harapkan, RUU BUMN ini sebenarnya mengurangi tadi, ya, isu-isu, apakah penugasan, apakah hal-hal yang tadi tumpang-tindih di kebijakan, nah, ini bisa menjadi sebuah payung plus kita juga dilibatkan dalam rencana kerja. Kalau Kementerian ESDM bisa, kenapa kementerian lain tidak? *Toh*, kita memang hanya fokus kepada tadi, bagaimana melaksanakan penugasan-penugasan yang ada *gitu*.

Yang kedua memang, ya sama, ibarat bola ya, kalau kemarin dapat kartu merah, ya kita enggak bisa marah, ya memang kartu merah *gitu*, yang sebelumnya marah-marah. Sama, *fair play*, bahwa keterbukaan, keseimbangan, apakah yang tadi dibicarakan oleh Pimpinan Komisi VI, APBN, penerimaan nomor satu. Ya memang, selama ini dengan segala ,mungkin dianggap kami-kami di BUMN *kok* menjadi *commercial* sekali, padahal *kan* tidak. Kita tetap 3 payung yang kita jalankan. Satu, fiskal. Kita membayar pajak, PNPB dan memberikan *dividen*. *Tapi*, kita tidak melupakan yang namanya *people's economic*, ekonomi kerakyatan,, di mana 92% kita tetap menyalurkan yang namanya tentu kredit untuk mikro, ultra mikro, dan menengah, kita laksanakan itu ataupun kita menyalurkan mungkin subsidi. Apakah itu tentu minyak, listrik, dan lain-lain.

Dan yang tidak kalah pentingnya sama seperti yang tadi dibicarakan. Kawasan Ekonomi Khusus kesehatan, itu lahir lebih dulu daripada Undang-Undang Kesehatan.

Nah, kalau ditanya kenapa agak mundur, ya karena memang izin-izinnya belum keluar juga sampai sekarang. Ini kita bicara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang punya payung kuat, ya, di bawah pemerintah, tapi itu kan izin-izinnya belum keluar semua, seperti tadi Benoa.

Nah, ini yang saya rasa, saya memohon, tadi ibarat kalau Pak Amin bilang Real Madrid ya *kan*, menit 88 sama 92 atau 93 *tuh*, Pak, ya *kan*. Ini sama, tinggal 5 bulan ini, mungkin ya, kita bersama-sama, kita juga bisa menggolkan yang namanya RUU BUMN atau pemikiran yang bersama bahwa BUMN bisa dilibatkan.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Izin, Pimpinan.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Dengan rencana.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kenapa, kenapa?

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Mungkin, dijelaskan poin mana *sih* sebetulnya yang menjadi, menjadi itu begitu berat untuk ...

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Ini kan kita juga enggak tahu poin mana *gitu*.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Iya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Bapak Menteri *kan* yang lebih tahu.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Yang, yang kita tahu *kan* sudah di Paripurna.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sudah di Paripurna, Pak?

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Sudah.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini agak mirip sama RUU Perkoperasian.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):



Perkoperasian.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

RUU Perkoperasian itu dari Presiden.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Sebenarnya sudah diketuk di Paripurna.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dari Presiden.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Bulan Oktober.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Pak Pimpinan, *gini loh*.

Kalau tertahan lama, itu berarti ada masalah, Pak.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ya.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Berarti ada *deadlock* kan? Nah, ini mungkin

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Offline.

F-PDIP (Prof (Assc) Dr. DARMADI DURianto, S.E., M.B.A.):

Oke, oke.

MENTERI BUMN RI (Dr. (H.C.) H. ERICK THOHIR, B.A., M.B.A.):

Ya, ini kembali. Kita bicara RUU BUMN, intinya sebuah inti sari yang bagus, yang dilahirkan oleh Komisi VI. Komisi VI yang mendorong RUU BUMN *loh*, bukan kami. RUU BUMN, bahwa Komisi VI mendorong menjadi sebuah solusi, ketika seluruh polemik ini terjadi, apa solusinya?

Nah, itu, itu nomor satu, saya rasa kembali, saya berulang-ulang bicara ini bukan istilahnya, karena ada payung, saya pakai payungnya, tidak.



Karena, ini realita, dengan segala argumentasi atau diskusi yang kita berikan selama ini.

Nah, yang kedua, tadi alangkah baiknya ya, ada beberapa percontohan seperti Borobudur, ketika *single authority* di bawah Perpres, kita jalankan. Lalu, ada terobosan dengan Kementerian ESDM mengenai RUPTL bersama PLN, mudah-mudahan disetujui antara dua kementerian. Ini juga bisa jadi *benchmarking* dengan kementerian lain. Apakah perhubungan, apakah PUPR, apakah yang lain. Ini jadi kita punya landasan rencana.

Nah, ini tetap, artinya terlepas dari RUU BUMN itu masih, tetapi kita juga tetap melakukan terobosan. Ya, apakah *single authority*, apakah persamaan RUPTL. Nah, ini yang kita lakukan. Dan ini saya rasa berharap memang, ya kita coba masih lakukan yang terbaik.

Mengenai kasus-kasus, *policy* kita sama, kembali kita tidak menutup mata dan saya tidak pernah bilang kita itu sempurna, selalu saya bilang, sempurna itu milik Allah *subhanahu wa taala*, bahwa memang kalau masih ada oknum-oknum ya, kita tinggal tindak secara tegas. Seperti, ketika kita bicara dengan pihak BPK, waktu itu. Akhirnya, BPK berkoordinasi dengan kejaksaan langsung untuk kasus Indofarma. Kita bilang silakan, ya.

Ataupun beberapa hal-hal lain yang memang terus kita lihat, *check and balance* bagaimana laporan keuangan *early warning* itu sebenarnya kita sudah ada, ya, Bu, ya, dan kita melaporkan ini ke BPKP. Jadi, *early warning* sebenarnya ada, tapi kita memang laporkan ke BPKP. Supaya BPKP yang menindaklanjutan.

Nah, saya setuju kalau Irjen ini ditingkatkan. Ya, karena di Kementerian itu, Irjen masih Eselon II. Ya memang, nah kalau ini bisa kita tingkatkan, kita senang sekali. Karena, ini jadi bagian juga penopang daripada perbaikan pengawasan yang selalu dari Komisi VI minta.

Tapi, yakin kita terus berupaya, bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih dukungan yang selama ini. Tetapi, saya tidak bisa menutup mata, memang masih ada ya, kalau 90% kasus lama, ternyata pada hari ini ada juga 10% kasus baru *gitu*. Ya ini, ya *tapi* 90% masih kasus lama, Pak, *gitu*.

Nah, kita coba berikan-berikan solusi yang ini. Dan saya tadi menawarkan ke Pimpinan ya, untuk diskusi *roadmap* ataupun *issue-issue* yang memang *offline*, saya menawarkan tadi sekalian kita kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan yang di Bali. Ya untuk akhir bulan ini tanggal 28, 29, 30 kalau memang Pimpinan dan seluruh Wakil Rakyat Komisi VI tidak keberatan, kita ingin mengundang, sekalian kita diskusi di sana ya dan kita coba, mumpung waktunya masih ada, sehingga di putaran akhir, ya kita bisa masih mendorong *issue-issue* yang kita bisa solusikan, ya. Karena, ini memang masih ada, *gitu*.

Jadi, saya tidak menjawab satu per satu, *tapi* tadi saya menjawab poin-poin yang besar. Nanti saya jawab tertulis, tetapi saya ingin mengundang, kalau tidak keberatan, kita juga diskusi mengenai *roadmap*, ya, kita juga



sudah paparan sebenarnya ke Bapak Presiden juga. Kita juga sudah paparan ke beberapa pihak, Bu Sri Mulyani kita sudah paparan, mengenai misalnya klasterisasi ke depan seperti apa *sih*, *gitu*, dana reksa seperti apa *sih*, bahkan surat mengenai dana reksa pun kita sudah kirim.

Nah, ini belum kita ceritakan ke Komisi VI. Nah, mungkin di Bali kita bisa paparkan. Ini salah satu terobosan lagi, ya yang kita lakukan selain tadi, *single authority* atau KEK, ataupun menyamai persepsi dengan RUPTL yang selama ini tidak mungkin terjadi, *gitu*. Nah, hal-hal ini kita berharap, ya kita coba lah.

Terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri.

Ya, nanti kita cek jadwal, ya, sekaligus ini, para rekan-rekan Pimpinan apa sudah balik ke Jakarta dari ibadah. Ya, *ntar* di cek, saya juga enggak hafal.

Baik, saya rasa cukup ya? Karena, tadi juga 16.30 cukup *kan?* Cukup. Sekarang kita masuk ke kesimpulan.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri, Menteri BUMN RI terkait RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2025, Evaluasi Anggaran Tahun 2023 dan Penyertaan Modal Negara Tahun 2025. Jumat, 7 Juni 2024.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN tahun 2023 yang mencapai 98,57%, serta mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ini pakai RI enggak? Tadi ada RI-nya.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Oke, Nomor

B.201/D.8/PP.04.03/04/2024, tanggal 5 April 2024, yang telah ditetapkan sebesar Rp277.498.437.000,00 yang terdiri atas:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp197.404.884.000,00,
- b. Program Pengembangan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Rp80.093.553.000,00.

Benar ya angkanya? Benar?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN RI tahun 2025 sebesar Rp66.644.541.000,00, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum *terakomodir* pada Pagu Indikatif Tahun 2025.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp44.249.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp13.868.000.000.000,00, dalam rangka pembangunan jalan tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3;
 - b. PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3.610.000.000.000,00, dalam rangka perbaikan permodalan;
 - c. PT PLN (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000,00, dalam rangka Program Listrik Desa;
 - d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000,00, dalam rangka Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - e. PT Pelnis (Persero) sebesar Rp 2.500.000.000.000,00, dalam rangka pengadaan kapal baru;
 - f. PT Biofarma (Persero) sebesar Rp2.212.000.000.000,00 dalam rangka *capital expenditure (capex)* fasilitas baru;
 - g. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp2.096.000.000.000,00, dalam rangka Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Jogja;
 - h. PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000,00, dalam rangka perbaikan struktur permodalan;
 - i. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000,00, dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi;

- j. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000,00, dalam rangka pengembangan usaha;
- k. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1.800.000.000.000,00, dalam rangka pengadaan *trainset* baru penugasan pemerintah;
- l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1.624.000.000.000,00 dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
- m. PT PP (Persero) Tbk. sebesar Rp1.563.000.000.000,00, dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang;
- n. Perum Damri sebesar Rp1.000.000.000.000,00, dalam rangka penyediaan bus listrik;
- o. Perumnas sebesar Rp1.000.000.000.000,00, dalam rangka penyelesaian penyediaan perumahan;
- p. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976.000.000.000,00, dalam rangka pembuatan Kereta Rel Listrik.

Habis ya, listrik.

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman usulan Penyertaan Modal Negara, kenapa jadi modal kerja? Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 dengan masing-masing BUMN calon penerima Penyertaan Modal Negara (PMN).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

- 5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan disepakatinya kesimpulan, maka kita akan mengakhiri rapat kali ini. Apakah Pak Menteri ada *closing statement*. Cukup?

Baik, dengan demikian, maka izinkan saya menutup rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan ditutup.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

